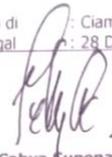


Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi

	
UNIVERSITAS GALUH	
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
Program Studi Administrasi Publik (S1) Terakreditasi Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi	
Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274	
KEPUTUSAN	
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
UNIVERSITAS GALUH	
Nomor : 0720/35/SK/AK/D/XII/2023	
TENTANG	
PENGUKUHAN MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN SKRIPSI	
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN	
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH	
TAHUN AKADEMIK 2023/2024	
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH,	
Menimbang	: a. bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, diharuskan melakukan penulisan dan penyusunan Skripsi; b. bahwa untuk membantu dalam menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan Skripsi dibutuhkan dosen pembimbing; c. bahwa sebagai tindak lanjut a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2022; 5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Galuh.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	
Kesatu	: Nama : NADYA EKI NUGRAHANI NIM : 3506200142 Sebagai Peserta Bimbingan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2023/2024, dengan judul Skripsi : "Implementasi Program Pelatihan Bagi Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap" .
Kedua	: Mahasiswa tersebut pada butir kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan Skripsi dibimbing oleh : 1. Dr. Erian Suwarian, S.IP.,M.I.Pol., sebagai pembimbing I 2. H. Otong Husni Taufiq, S.IP.,M.Si., sebagai pembimbing II
Ketiga	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
Keempat	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.
 Ditetapkan di : Ciamis Pada tanggal : 28 Desember 2023 Dekan,  Dr. Cecep Cahya Supena, S.H.,M.H.,M.Si. NIDN. 0424117001	

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

Nomor : 0865/35/SP/AK/DI/XI/2023 Ciamis, 2 November 2023
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Observasi dan Informasi Data**

Kepada,
Yth. **Kepala Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap**
di

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Nadya Eki Nugrahani
NIM : 3506200142
Semester : VII
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

bermaksud untuk mengadakan observasi di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap mulai tanggal 11 November 2023 s.d.15 Desember 2023

Adapun maksud dari observasi dan permohonan informasi data tersebut adalah untuk memenuhi proses pembuatan proposal penelitian dengan judul :

“Implementasi Program Pelatihan Bagi Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan ijin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Arsip



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
 Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

Nomor : 0865/35/SP/AK/DI/XI/2023 Ciamis, 2 November 2023
 Lampiran :
 Perihal : **Permohonan Observasi dan Informasi Data**

Kepada,
 Yth. **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Kabupaten Cilacap**
 di

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Nadya Eki Nugrahani
 NIM : 3506200142
 Semester : VII
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan

bermaksud untuk mengadakan observasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Kabupaten Cilacap mulai tanggal 11 November 2023 s.d.15 Desember 2023

Adapun maksud dari observasi dan permohonan informasi data tersebut adalah untuk memenuhi proses pembuatan proposal penelitian dengan judul :

“Implementasi Program Pelatihan Bagi Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan ijin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


 dan Dekan
 Wakil Dekan I
Etih Henrivani, S.IP., M.Si.
 NIK. 3112770206

Tembusan :

1. Arsip

Lampiran 3 Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/Tanggal	:	
Tempat	:	
Waktu	:	

No	Objek yang diamati	Hasil Observasi
1	Profil Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap	<p>Desa Cilongkrang berada di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 744,32 Ha. Secara geografis desa Cilongkrang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelah Utara : Desa Tarisi Kecamatan Wanareja b. Sebelah Selatan : Desa Purwasari Kecamatan Wanareja c. Sebelah Timur : Desa Cisuru Kecamatan Cipari d. Sebelah Barat : Sungai Citanduy Jawa Barat Kecamatan Lakbok Jawa Barat <p>Secara Administratif, wilayah Desa Cilongkrang terdiri dari 3 Dusun yaitu: Dusun Cilongkrang Barat, Dusun Cilongkrang Selatan dan Dusun Cilongkrang Timur, serta 7 RW dan 25 RT. Secara umum Tipologi Desa Cilongkrang terdiri dari Persawahan, Perkebunan, Industri kecil, Jasa dan perdagangan. Topografis Desa Cilongkrang secara umum termasuk daerah dataran rendah, dan berbukit bergelombang dan berdasarkan</p>

		ketinggian wilayah Desa Cilongkrang diklasifikasikan kepada Dataran Sedang (>100-500 mdpl).
2	Visi dan misi Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap	<p style="text-align: center;">Visi</p> <p style="text-align: center;"><i>“Mewujudkan Desa Cilongkrang Yang Mandiri, Berdedikasi dan Menjamin Kesejahteraan Penduduk Melalui Pemerintahan Desa yang Profesional, Amanah dan Ramah.”</i></p> <p style="text-align: center;">Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, dan responsif. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses, merencanakan, melaksanakan, dan menjaga hasil-hasil pembangunan. 3. Menumbuhkan rasa percaya pada kekuatan sendiri dengan menggali potensi, memanfaatkan dan melestarikan. 4. Membangun sarana dan prasarana berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan sektor pertanian sebagai prioritas utama. 5. Meningkatkan dan memberdayakan peran wanita dan pemuda dalam membangun pola hidup sehat dengan menciptakan kondisi lingkungan yang agamis dan kondusif.

3	<p>Implementasi Program Pelatihan Bagi Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap</p>	<p>a. Komunikasi antara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Pemerintah Desa Cilongkrang belum optimal karena masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi yang diberikan.</p> <p>b. Sumber daya dari staf narasumber sudah kompeten dibidangnya tetapi sumber daya dari perangkat Desa Cilongkrang belum mampu merealisasikan program yang diberikan dengan baik apalagi ditinjau dari tingkat pendidikan, usia dan perangkat desa yang baru.</p> <p>c. Disposisi belum cukup baik, perangkat desa kurang memiliki sikap patuh apalagi jika terkait aduan dari masyarakat, serta kurangnya keterbukaan dan profesionalan pemerintah desa.</p> <p>d. Struktur birokrasi sudah cukup baik dan sesuai SOPs. Setiap unit kerja menjalankan tugasnya berdasarkan prosedur yang jelas dan terstruktur.</p>
---	--	---

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Hari/Tanggal :

1. Komunikasi

- a) Transmisi: Adanya penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang.
 1. Bagaimana penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?
 2. Hambatan apa yang ditemui dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?
- b) Kejelasan: Adanya kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang.
 1. Bagaimana kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?

2. Hambatan apa yang ditemui dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?
- c) Konsistensi: Adanya komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan.
1. Bagaimana komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?
 2. Hambatan apa yang ditemui dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?
2. Sumber Daya
- a) Staf: Adanya sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan.
1. Bagaimana sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?
 2. Hambatan apa yang ditemui dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?
- b) Informasi: Adanya pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya.
1. Bagaimana pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?
 2. Hambatan apa yang ditemui dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?

3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?
- c) Wewenang: Adanya kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan.
1. Bagaimana kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?
 2. Hambatan apa yang ditemui dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?
- d) Fasilitas: Adanya fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan.
1. Bagaimana fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?
 2. Hambatan apa yang ditemui dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?
3. Disposisi
- a) Efek Disposisi: Adanya sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya.
1. Bagaimana sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?
 2. Hambatan apa yang ditemui dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?

- b) Melakukan pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya.
 - 1. Bagaimana pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?
 - 2. Hambatan apa yang ditemui dalam pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?
 - 3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?
 - c) Insentif: Adanya insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal.
 - 1. Bagaimana insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?
 - 2. Hambatan apa yang ditemui dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?
 - 3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?
4. Struktur Birokrasi
- a) Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs): Adanya struktur birokrasi sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOPs).
 - 1. Bagaimana struktur birokrasi sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOPs)?
 - 2. Hambatan apa yang ditemui dalam struktur birokrasi sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOPs)?
 - 3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada struktur birokrasi sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOPs)?
 - b) Melaksanakan fragmentasi: Adanya sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan.
 - 1. Bagaimana sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?

2. Hambatan apa yang ditemui dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?

Lampiran 5 Berita Acara

BERITA ACARA WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang bersangkutan dengan pembuatan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul sebagai berikut: Implementasi Program Pelatihan Bagi Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

Adapun informan yang penulis wawancarai adalah Kepala Desa Cilongkrang, Sekertaris Desa Cilongkrang, Kasi Pelayanan Desa Cilongkrang, Analisis Desa dan Kelurahan Dispermades Kabupaten Cilacap dan Tokoh Masyarakat Desa Cilongkrang.

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Tanggal Pelaksanaan Wawancara	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Lampiran 6 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Informan 1

Nama : Endang Wahyu Sudarman Putra
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 58
 Jabatan : Kepala Desa Cilongkrang
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Rt 01 Rw 06 Desa Cilongkrang, Kecamatan
 Wanareja, Kabupaten Cilacap
 Hari/Tanggal : Kamis, 2 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Komunikasi yang terjalin sebenarnya sudah cukup baik.
2.	Hambatan apa yang ditemui dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Kadang-kadang penyampaiannya dilakukan oleh perwakilan sekertaris desa, karena kesibukan sekertaris desa penyampaiannya terkadang jadi terlambat.
3.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Mengevaluasi secara berkala terhadap sistem komunikasi yang ada untuk mengidentifikasi adanya kendala dan mencari solusi yang tepat agar penyampaiannya tidak mengalami keterlambatan lagi.
4.	Bagaimana kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Menurut saya keseluruhan prosesnya sudah lengkap dan jelas dilihat dengan surat undangan pelatihan dan ketika dalam pelatihan materi yang disampaikanpun selaras dengan kebutuhan desa, selain itu dinas

		juga lebih terbuka atas pertanyaan yang kami ajukan.
5.	Hambatan apa yang ditemui dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Tidak ada hambatan dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang.
6.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	
7.	Bagaimana komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Penyampaian komunikasi yang diberikan sudah cukup baik, dengan informasi yang disampaikan secara jelas dan konsisten tanpa adanya perubahan yang membingungkan.
8.	Hambatan apa yang ditemui dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Tidak ada hambatan dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan.
9.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	
10.	Bagaimana sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Kalau untuk staf dinas sepertinya sudah ahli dibidangnya, tetapi dalam pelaksanaannya kami saling bersinegri satu sama lainnya.
11.	Hambatan apa yang ditemui dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Beberapa perangkat desa masih belum bisa merealisasikan kebijakan yang diberikan.
12.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Memberikan pemahaman tentang tanggungjawab perangkat desa dalam melaksanakan kebijakan serta saling bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan program yang lebih maksimal lagi kedepannya.
13.	Bagaimana pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan	Pemahaman kami mengenai aturan yang berlaku sudah cukup baik, kami berkomitmen untuk

	yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, termasuk mengikuti pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk memastikan bahwa langkah yang kami ambil sejalan dengan hukum.
14.	Hambatan apa yang ditemui dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Tidak ada hambatan dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya.
15.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	
16.	Bagaimana kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Kembali lagi ya dengan mematuhi peraturan yang berlaku agar proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan karena kami selalu mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
17.	Hambatan apa yang ditemui dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Tidak ada hambatan dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan.
18.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	
19.	Bagaimana fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Alhamdulillah sejauh ini fasilitasnya sudah memadai dalam proses pelatihan maupun pelayanan kepada masyarakat, ini juga dapat memberikan keyakinan bawasannya program-program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

20.	Hambatan apa yang ditemui dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Tidak ada hambatan dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan.
21.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	
22.	Bagaimana sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	Kami bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pelatihan agar nantinya dapat memberikan hasil yang maksimal dan lebih baik kedepannya kepada masyarakat.
23.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	Tidak ada hambatan dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya.
24.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	
25.	Bagaimana pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	Iya penting untuk memberikan tugas sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing individu agar proses pengimplementasinya lebih maksimal sesuai apa yang diinginkan.
26.	Hambatan apa yang ditemui dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	Tidak ada hambatan dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya.
27.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	

28.	Bagaimana insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Untuk insentif ya ada tentunya karena ini termasuk di luar gaji pokok kami sebagai perangkat desa, karena biasanya pelatihan juga dilaksanakan di kabupaten yang jaraknya cukup jauh jadi membutuhkan uang transport tambahan bagi peserta pelatihan.
29.	Hambatan apa yang ditemui dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Tidak ada hambatan dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal.
30.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	
31.	Bagaimana struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Dengan melakukan pembagian kerja dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Standar Operating Procedures (SOPs) serta surat keputusan yang berlaku.
32.	Hambatan apa yang ditemui dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Tidak ada hambatan dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs).
33.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	
34.	Bagaimana sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Dengan melaksanakan kegiatan secara maksimal dan terus menerima masukan serta kritik untuk perbaikan ke depan, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan setiap program pelatihan yang kami jalankan.
35.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Tidak ada hambatan dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan.
36.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sikap tanggung jawab para pelaksana	

	kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	
--	--	--

B. Informan 2

Nama: Rohmanudin

Jenis Kelamin: Laki-laki

Usia: 44

Jabatan: Sekertaris Desa Cilongkrang

Pendidikan Terakhir: S1

Alamat: Rt 01 Rw 05 Desa Cilongkrang, Kecamatan Wanareja, Kabupaten

Cilacap

Hari/Tanggal: Jum'at, 3 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Sejauh ini komunikasi sudah berjalan dengan cukup baik yang didukung oleh surat keputusan yang diberikan oleh pihak dinas kepada kecamatan yang kemudian diteruskan kepada desa.
2.	Hambatan apa yang ditemui dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Tidak ada hambatan Hambatan apa yang ditemui dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang.
3.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	
4.	Bagaimana kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Cukup jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku dan nantinya desa juga menyelaraskan terkait regulasi tersebut karena program pelatihan juga ada yang memang penyelenggaraan di dinas maupun di desa.

5.	Hambatan apa yang ditemui dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Tidak ada hambatan dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang.
6.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	
7.	Bagaimana komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Sudah cukup baik dan dilakukan secara lebih terstruktur, sehingga apabila ada perubahan bisa langsung dikomunikasikan, namun sejauh ini tidak terjadi perubahan karena perencanaannya sudah cukup matang.
8.	Hambatan apa yang ditemui dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Tidak ada hambatan dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan.
9.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	
10.	Bagaimana sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Saya kira sebagai lembaga pelaksana yang lebih dulu mendapatkan pelatihan sudah kompeten selanjutnya dari sumber daya perangkat desa juga telah berhasil menyelaraskan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien.
11.	Hambatan apa yang ditemui dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Tidak ada hambatan dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan.
12.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	

13.	Bagaimana pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Dengan adanya regulasi tentunya sebagai pedoman yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga kami mendapatkan arahan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
14.	Hambatan apa yang ditemui dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Tidak ada hambatan dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya.
15.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	
16.	Bagaimana kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Kami melakukan segala bentuk program pelatihan sesuai dengan kewenangan yang berlaku dengan rencana maupun jadwal yang tertera untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan prosedur dan memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas perangkat desa.
17.	Hambatan apa yang ditemui dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Tidak ada hambatan dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan.
18.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	
19.	Bagaimana fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai dan sangat menunjang terselesaikannya kebijakan yang sudah direncanakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan lebih baik.

20.	Hambatan apa yang ditemui dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Tidak ada hambatan dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan.
21.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	
22.	Bagaimana sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	Melakukan inovasi-inovasi dan menerapkan proses pelaksanaan program adalah bagian penting dari upaya kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
23.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	Tidak ada hambatan dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya.
24.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	
25.	Bagaimana pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	Tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, dengan memahami dan menjalankan tupoksi dengan baik setiap perangkat desa akan berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
26.	Hambatan apa yang ditemui dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	Tidak ada hambatan dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya.
27.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	

28.	Bagaimana insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Adanya tunjangan kinerja, tunjangan pengelola kegiatan yang menjadi insentif bagi kami dalam berbagai pelaksanaan kegiatan dari program-program pelatihan yang dilaksanakan.
29.	Hambatan apa yang ditemui dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Tidak ada hambatan dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal.
30.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	
31.	Bagaimana struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Struktur birokrasi pemerintahan desa kami mengikuti Standar Operating Procedures (SOPs) untuk menjamin bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan tepat.
32.	Hambatan apa yang ditemui dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Tidak ada hambatan dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs).
33.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	
34.	Bagaimana sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Kami selalu berupaya melaksanakan dan berinovasi semaksimal mungkin agar terciptanya pelaksanaan program yang lebih maksimal serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
35.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Tidak ada hambatan dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan.

36.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	
-----	---	--

C. Informan 3

Nama: Sumidi Idelkha

Jenis Kelamin: Laki-laki

Usia: 33

Jabatan: Kasi Pelayanan Desa Cilongkrang

Pendidikan Terakhir: SMA

Alamat: Rt 02 Rw 02 Desa Cilongkrang, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap

Hari/Tanggal: Kamis, 2 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Komunikasi yang terjalin sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku yang nantinya proses pelatihan bisa terealisasi kepada masyarakat tentunya.
2.	Hambatan apa yang ditemui dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Tidak ada hambatan dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang.
3.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	
4.	Bagaimana kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Terkait dengan kejelasan, pihak dinas memberikan informasi yang sangat jelas seperti mengirim surat undangan melalui perantara dari kecamatan.

5.	Hambatan apa yang ditemui dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Tidak ada hambatan dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang.
6.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	
7.	Bagaimana komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Didasarkan kepada peraturan yang ada tentunya dan memang sudah terjadwal sehingga kami dapat melaksanakan program pelatihan sesuai dengan semestinya.
8.	Hambatan apa yang ditemui dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Tidak ada hambatan dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan.
9.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	
10.	Bagaimana sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Sumber dayanya masih belum sepenuhnya kompeten dalam proses outputnya.
11.	Hambatan apa yang ditemui dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	masih belum sepenuhnya kompeten dalam proses outputnya.
12.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	melakukan evaluasi secara berkala serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kemampuan tim secara keseluruhan, sehingga output yang dihasilkan dari program pelatihan dapat lebih optimal.
13.	Bagaimana pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Terkait pemahaman dan sikap patuh yaitu dengan cara mengimplementasikan materi yang sudah diberikan serta melakukan

		mekanisme yang berkaitan dengan program pelatihan tersebut untuk menerapkannya dalam praktik sehari-hari.
14.	Hambatan apa yang ditemui dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Tidak ada hambatan dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya.
15.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	
16.	Bagaimana kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Selalu melaksanakan bentuk pelaporan dari setiap progres maupun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lebih transparan untuk menghindari adanya penyelewengan wewenang.
17.	Hambatan apa yang ditemui dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Tidak ada hambatan dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan.
18.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	
19.	Bagaimana fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Sudah sangat memadai seperti diberikannya fasilitas penyedia alat seperti tersedianya komputer dan proyektor yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian informasi serta pembelajaran.
20.	Hambatan apa yang ditemui dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Tidak ada hambatan dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan.
21.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada fasilitas	

	fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	
22.	Bagaimana sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	Kami terus berupaya keras untuk memaksimalkan kebijakan agar nantinya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat agar dapat memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan dapat menjadi lebih baik dan responsif terhadap perubahan maupun tantangan yang terjadi di lingkungan desa cilongkrang.
23.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	Tidak ada hambatan dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya.
24.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	
25.	Bagaimana pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	Proses pelaksanaannya sesuai dengan bidangnya tetapi tetap saling membantu dan bersinegri antara yang satu dengan yang lainya agar mencapai hasil yang lebih baik dan efisien dalam mencapai tujuan bersama.
26.	Hambatan apa yang ditemui dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	Tidak ada hambatan dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya.
27.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian	

	kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	
28.	Bagaimana insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Selain fasilitas yang diberikan kami juga diberi insentif dan ini diluar gaji pokok kami, seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang biasanya mencakup informasi seperti tujuan perjalanan, waktu perjalanan dan alokasi biaya yang ditanggung.
29.	Hambatan apa yang ditemui dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Tidak ada hambatan dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal.
30.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	
31.	Bagaimana struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Prosedures</i> (SOPs)?	Selaras dengan tugas dan tanggungjawab yang di emban melalui pembagian-pembagian yang sesuai dengan standarnya agar setiap perangkat desa memiliki peran yang jelas dan dapat melaksanakan tanggungjawabnya untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
32.	Hambatan apa yang ditemui dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Prosedures</i> (SOPs)?	Tidak ada hambatan dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Prosedures</i> (SOPs).
33.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Prosedures</i> (SOPs)?	
34.	Bagaimana sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Secara rill tanggung jawabnya sudah dijalankan dengan baik, hal ini tercermin dari kinerja perangkat desa yang konsisten dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang telah di percayakan.

35.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Tidak ada hambatan dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan.
36.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	

D. Informan 4

Nama: Ricky Ferdyana

Jenis Kelamin: Laki-laki

Usia: 28

Jabatan: Analisis Desa dan Kelurahan

Pendidikan Terakhir: S1

Alamat: Telaga Rt 03 Rw 02, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas

Hari/Tanggal: Rabu, 15 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Terkait penyaluran komunikasi melalui beberapa tahapan seperti penyaluran surat pertama dimasukan ke kecamatan dulu baru nantinya dari pihak kecamatan menyampaikan ke desa.
2.	Hambatan apa yang ditemui dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	sekertaris desa terkadang terlambat dalam mengomunikasikan kepada perangkat lainnya.
3.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	mempercepat penyampaian informasi menggunakan aplikasi pesan singkat seperti whatsapp atau telegram untuk komunikasi yang cepat dan efektif sehingga pelaksanaanya dapat dilaksanakan secara maksimal.

4.	Bagaimana kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Dalam penyampaian komunikasi yang kami gunakan selalu melakukan sesi tanya jawab sehingga jika dirasa kurang jelas dapat ditanyakan langsung untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami tujuan, materi dan manfaat dari pelatihan-pelatihan tersebut.
5.	Hambatan apa yang ditemui dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Tidak ada hambatan dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang.
6.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	
7.	Bagaimana komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Dengan melakukan komunikasi bertahap dan sejauh ini tidak pernah terjadi perubahan-perubahan dan apabila terjadi perubahanpun nantinya akan langsung kami sampaikan, kami juga biasanya mengadakan rakor yang agendanya cukup rutin dan bila ada perubahan bisa kami sampaikan di rakor tersebut.
8.	Hambatan apa yang ditemui dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Tidak ada hambatan dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan.
9.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	
10.	Bagaimana sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Jelas ya dalam sumber daya manusia apalagi dari perangkat desanya itu sendiri.
11.	Hambatan apa yang ditemui dalam sumber daya manusia yang terlibat	ada perangkat desa yang baru yang masih butuh proses penyesuaian di cilongkrang.

	dalam pelaksanaan program pelatihan?	
12.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	melaksanakan pendampingan serta dukungan praktis dalam membantu adaptasinya.
13.	Bagaimana pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Menurut saya perangkat desa masih kurang memahami berbagai aturan-aturan yang ada dan juga kurang memiliki kemauan untuk belajar.
14.	Hambatan apa yang ditemui dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	perangkat desa masih kurang memahami berbagai aturan-aturan yang ada dan juga kurang memiliki kemauan untuk belajar.
15.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	memberikan pemahaman terkait aturan yang berlaku serta menekankan pentingnya sikap tanggungjawab dalam menjalankan setiap program.
16.	Bagaimana kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Dengan diadakannya pengawasan dan monitoring yang ketat selama pelaksanaan, kami dapat memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan, selain itu monitoring yang ketat memungkinkan kami untuk segera mengatasi hambatan yang muncul.
17.	Hambatan apa yang ditemui dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Tidak ada hambatan dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan.
18.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	

19.	Bagaimana fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Kalau untuk fasilitas tergantung kepada kebutuhan desanya masing-masing, dari kami bisa berupa ruangan yang ada di lantai atas kalo ngga penyelenggaraanya juga bisa dilakukan di hotel.
20.	Hambatan apa yang ditemui dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Tidak ada hambatan dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan.
21.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	
22.	Bagaimana sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya?	Saya berharap pemerintah desa lebih patuh kepada kebijakan yang ada agar pelayanannya dapat berjalan dengan baik karena hasil dari pelatihan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan tetap pada tangan pemerintahan desa karena mereka sebagai pelaksana. Dengan mematuhi kebijakan yang ada, pemerintah desa dapat memastikan bahwa upaya pelatihan yang dilakukan berdampak positif bagi masyarakat dan membawa kemajuan dalam pembangunan desa.
23.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya?	Tidak ada hambatan dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya.
24.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya?	
25.	Bagaimana pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya?	Sesuai dengan STOK pemerintahan desa yaitu Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016, namun dalam proses pelatihan terkadang tidak sesuai dengan tupoksinya yang penting adalah

		memastikan bahwa proses pelaksanaannya berjalan lancar dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan masyarakat desa.
26.	Hambatan apa yang ditemui dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	Tidak ada hambatan dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya.
27.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	
28.	Bagaimana insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Tidak ada, kalo transport juga itu kan dari desanya sendiri tetapi kalo program-program pelatihan yang diberikan dari kemendagri ya biasanya disertai dengan alokasi dana insentif untuk mendukung pelaksanaannya.
29.	Hambatan apa yang ditemui dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Tidak ada hambatan dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal.
30.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	
31.	Bagaimana struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Disesuaikan dengan standar karena SOPs ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tugas dan tanggungjawab dilaksanakan secara efektif dan efisien.
32.	Hambatan apa yang ditemui dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Tidak ada hambatan dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs).
33.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada struktur	

	birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	
34.	Bagaimana sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Menurut saya dari segi sikap tanggungjawab sudah mencapai tingkat yang memadai dan cukup baik.
35.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Tidak ada hambatan dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan.
36.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	

E. Informan 5

Nama: Narko Upoyo

Jenis Kelamin: Laki-laki

Usia: 30

Jabatan: Analisis Desa dan Kelurahan

Pendidikan Terakhir: S1

Alamat: Desa Menganti Rt 01 Rw 07, Kecamatan Rawalo, Kabupaten

Banyumas

Hari/Tanggal: Rabu, 15 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Ada dua komunikasi yang kami jalani yang pertama komunikasi secara resmi yaitu bimtek dan rapat-rapat, yang kedua komunikasi tidak resmi dengan grup seperti grup paguyuban kades, sekdes, kasi pemerintahan, BPD dan kasi pemberdayaan desa yang ada di kecamatan wanareja.
2.	Hambatan apa yang ditemui dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas	Tidak ada hambatan dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang.
3.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	
4.	Bagaimana kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Kami akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh perangkat desa agar mereka dapat mengikuti dan memahami pelatihan dengan baik, selain itu materi pelatihan akan disampaikan secara terstruktur dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
5.	Hambatan apa yang ditemui dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Tidak ada hambatan dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang.
6.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	
7.	Bagaimana komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Secara konsisten tidak pernah terjadi perubahan karena sebelum pelaksanaan baik itu rencana, anggaran dll sudah dipersiapkan dengan matang baru nantinya bisa langsung disampaikan kepada perangkat desa yang bersangkutan, segala bentuk pelaksanaan juga sesuai dengan peraturan yang ada.
8.	Hambatan apa yang ditemui dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Tidak ada hambatan dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan.

9.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	
10.	Bagaimana sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Dilihat dari tingkat pendidikan terutama jika mempertimbangkan perangkat desa yang baru dan yang sepuh, perangkat desa yang baru mungkin memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi di bandingkan dengan yang sepuh dan terbiasa dengan teknologi modern sementara perangkat desa yang sepuh harus banyak melakukan penyesuaian.
11.	Hambatan apa yang ditemui dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Masih kurang dalam tingkat pendidikan, perangkat baru maupun yang sudah lanjut usia.
12.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Menyesuaikan kemampuan masing-masing Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kebutuhan yang lebih spesifik dari program pelatihan yang dilaksanakan, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
13.	Bagaimana pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Yang tidak patuh pasti ada, tapi kembali lagi dengan di adakanya pelatihan diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja mereka dan fungsi pelatihan kami lebih ke pembinaan.
14.	Hambatan apa yang ditemui dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Masih ada yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.
15.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Memberikan pemahaman akan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kinerja mereka.
16.	Bagaimana kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Salah satunya dengan diberikanya intruksi tertulis dan resmi kepada perangkat desa dengan memastikan setiap langkah dalam

		proses pelaksanaan terdokumentasi dengan baik dan jelas, langkah ini tidak hanya memberikan arahan yang jelas tetapi dapat menciptakan jejak dokumentasi untuk keperluan evaluasi kami.
17.	Hambatan apa yang ditemui dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Tidak ada hambatan dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan.
18.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	
19.	Bagaimana fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Disesuaikan dengan program pelatihannya saja seperti pelatihan siskeudes kan dilakukan di laptop masing-masing jadi mereka harus membawa laptonya karena kami juga tidak menyediakan itu, yang ada seperti proyektor papan tulis dll.
20.	Hambatan apa yang ditemui dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Tidak ada hambatan dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan.
21.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	
22.	Bagaimana sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	Cukup baik dan harus lebih berkomitmen apalagi kanal-kanal terkait laporan aduan masyarakat sudah banyak seperti LaporBup dll, nah nanti masuk kepada kami terus nantinya di klarifikasi dan harus ditangani.
23.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepannya?	laporan aduan masyarakat sudah banyak seperti LaporBup dll, nah nanti masuk kepada kami terus nantinya di klarifikasi dan harus ditangani.

24.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya?	memastikan setiap langkah yang diambil harus ditangani dengan serius sebagai bentuk keterbukaan dalam menanggapi masalah yang dilaporkan oleh masyarakat.
25.	Bagaimana pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya?	Kami menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis kompetensi dalam proses pelatihan jadi dengan cara ini kami dapat memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kapasitas mereka.
26.	Hambatan apa yang ditemui dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya?	Tidak ada hambatan dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya.
27.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya?	
28.	Bagaimana insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Selama ini program pelatihan tidak menyediakan insentif bagi para peserta karena pemerintah desa mengatur sendiri SPPDnya untuk dapat memungkinkan desa mengalokasikan sumber daya secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.
29.	Hambatan apa yang ditemui dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Tidak ada hambatan dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal.
30.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada insentif untuk mendorong	

	terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	
31.	Bagaimana struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	SOPs kami mengatur alur kerja dan komunikasi antar unit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program agar teroordinasi serta dapat memberikan penilaian pada program pelatihan yang dilaksanakan.
32.	Hambatan apa yang ditemui dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Tidak ada hambatan dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs).
33.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	
34.	Bagaimana sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Cukup baik hanya saja hasilnya tidak bisa langsung dirasakan saat ini, diperlukan waktu untuk melihat progres secara penuh di masa mendatang.
35.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Tidak ada hambatan dalam mengatasi hambatan pada sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan.
36.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	

F. Informan 6

Nama: Sulis Setiyawati

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia: 34

Jabatan: Tokoh Masyarakat Desa Cilongkrang

Pendidikan Terakhir: SMA

Alamat: Rt 01 Rw 04, Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap

Hari/Tanggal: Rabu, 15 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Menurut saya penyampaian komunikasi sudah berjalan dengan baik dan cukup efektif dalam memastikan bahwa pesan tersampaikan dengan jelas.
2.	Hambatan apa yang ditemui dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Tidak ada hambatan dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang.
3.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	
4.	Bagaimana kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Sudah cukup jelas dan kami yakin dalam pelaksanaannya narasumber yang dipilih benar-benar kompeten di bidangnya, dan memang mereka selalu memberikan sesi tanya jawab apabila ada hal yang belum benar-benar dipahami.
5.	Hambatan apa yang ditemui dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Tidak ada hambatan dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang.

6.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	
7.	Bagaimana komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Alhamdulillah komunikasi yang dijalankan sudah cukup baik dan dilakukan secara bertahap, jarang sekali terjadi perubahan-perubahan pada pelaksanaannya.
8.	Hambatan apa yang ditemui dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Tidak ada hambatan dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan.
9.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	
10.	Bagaimana sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Sudah kompeten, berpengalaman dan benar-benar menjunjung dedikasi tinggi terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa, menurut saya mereka juga terus berupaya memberikan kontribusi terbaiknya.
11.	Hambatan apa yang ditemui dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Tidak ada hambatan dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan.
12.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	
13.	Bagaimana pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Sepertinya pemahaman perangkat desa terhadap aturan yang berlaku masih belum cukup terkadang apabila ditanya masih terlihat bingung.

14.	Hambatan apa yang ditemui dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Pemahaman perangkat desa terhadap aturan yang berlaku masih belum cukup.
15.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Meningkatkan pemahaman terkait aturan yang ada kepada perangkat desa.
16.	Bagaimana kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Saya rasa sudah cukup baik, tetapi jika menyangkut kewenangan seperti ini perlu di lakukan pengawasan yang cukup agar mencegah potensi pelanggaran.
17.	Hambatan apa yang ditemui dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Tidak ada hambatan dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan.
18.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	
19.	Bagaimana fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Alhamdulillah fasilitas yang tersedia dalam program pelatihan maupun pelayanan kepada masyarakat sejauh ini menurut saya sudah cukup memadai dan lengkap.
20.	Hambatan apa yang ditemui dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Tidak ada hambatan dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan.
21.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	
22.	Bagaimana sikap komitmen terhadap jalannya proses	Sudah baik, tetapi perangkat desa harus bisa memastikan kebijakan yang

	kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya?	diimplementasikan benar-benar berfokus kepada kebutuhan masyarakat.
23.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya?	Tidak ada hambatan dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya.
24	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya?	
25.	Bagaimana pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	Sudah cukup baik dan sangat penting untuk memastikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing.
26.	Hambatan apa yang ditemui dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	Tidak ada hambatan dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya.
27.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuannya?	
28.	Bagaimana insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Terkait insentif yang diberikan pasti ada dalam pelaksanaan program-program pelatihan yang diberikan, hanya saja menyesuaikan jarak tempuhnya.

29.	Hambatan apa yang ditemui dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Tidak ada hambatan dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal.
30.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	
31.	Bagaimana struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Sudah sesuai dan hal ini penting untuk ditingkatkan karena bisa juga untuk mengawasi kinerja dan memastikan bahwa setiap tindakan sudah sesuai dengan SOPsnya.
32.	Hambatan apa yang ditemui dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Tidak ada hambatan dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs).
33.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	
34.	Bagaimana sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Menurut saya sudah baik tanggungjawabnya harus lebih ditingkatkan lagi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
35.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Tidak ada hambatan dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan.
36.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	

G. Informan 7

Nama: Nasih

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia: 72

Jabatan: Tokoh Masyarakat Desa Cilongkrang

Pendidikan Terakhir: SMP

Alamat: Rt 03 Rw 06 Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap

Hari/Tanggal: Rabu, 15 Mei 2024.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Menurut saya komunikasi yang terjalin sudah baik dan sesuai dengan mekanisme yang memang sudah ditetapkan, baik dari dinas, perangkat desa maupun masyarakat.
2.	Hambatan apa yang ditemui dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	Tidak ada hambatan dalam penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang.
3.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang?	
4.	Bagaimana kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Penyampaian informasi yang diberikan sudah cukup baik, jelas dan mudah untuk dapat dipahami.
5.	Hambatan apa yang ditemui dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	Tidak ada hambatan dalam kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang.

6.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada perangkat desa cilongkrang?	
7.	Bagaimana komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Sudah cukup baik sehingga dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik karena komunikasi yang terjalin dilakukan secara berkala.
8.	Hambatan apa yang ditemui dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	Tidak ada hambatan dalam komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan.
9.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan?	
10.	Bagaimana sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Sudah cukup baik, dengan pemilihan sumber daya manusia yang tepat agar disesuaikan dengan pelaksanaan program.
11.	Hambatan apa yang ditemui dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	Tidak ada hambatan dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan.
12.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan?	
13.	Bagaimana pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	Menurut saya sikap patuh perangkat desa pada hukum khususnya terkait dengan program pelatihan sudah cukup baik.
14.	Hambatan apa yang ditemui dalam pemahaman dan sikap	Tidak ada hambatan dalam pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai

	patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya.
15.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya?	
16.	Bagaimana kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Menurut saya terkait wewenang sudah cukup baik tetapi perangkat desa harus tetap diawasi dengan ketat selama pelatihan supaya perintahnya bisa diikuti dengan benar.
17.	Hambatan apa yang ditemui dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	Tidak ada hambatan dalam kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan.
18.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan?	
19.	Bagaimana fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Fasilitas yang diberikan cukup membantu dan memadai dalam melayani kebutuhan masyarakat.
20.	Hambatan apa yang ditemui dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Tidak ada hambatan dalam fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan.
21.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada fasilitas fisik (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan?	Tidak ada hambatan.
22.	Bagaimana sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun	Menurut saya masih ada kekurangan dalam hal keterbukaan dan profesional.

	kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya?	
23.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya?	Masih ada kekurangan dalam hal keterbukaan dan profesional.
24	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya?	Meningkatkan transparansi dan keprofesionalan setiap tugas dan tanggung jawab perangkat desa untuk membangun kepercayaan masyarakat.
25.	Bagaimana pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya?	Menurut saya sejauh ini setiap perangkat sudah menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tanggungjawabnya.
26.	Hambatan apa yang ditemui dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya?	Tidak ada hambatan dalam pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya.
27.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya?	
28.	Bagaimana insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Sejauh ini ada insentif yang diberikan dan hasil dari program pelatihan tersebut sangat bermanfaat.

29.	Hambatan apa yang ditemui dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	Tidak ada hambatan dalam insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal.
30.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal?	
31.	Bagaimana struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Sebagai tokoh masyarakat, saya melihat bahwa SOPs sangat penting untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik di desa cilongkrang.
32.	Hambatan apa yang ditemui dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	Tidak ada hambatan dalam struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs).
33.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada struktur birokrasi sesuai dengan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOPs)?	
34.	Bagaimana sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Dalam pelaksanaan program sudah dijalankan dengan baik dan perangkat desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.
35.	Hambatan apa yang ditemui dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	Tidak ada hambatan dalam sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan.
36.	Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan?	

Lampiran 7 Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Narko Upoyo, S.Ap. bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap pada Hari Rabu, 15 Mei 2024.



Wawancara dengan Bapak Ricky Ferdyana, S.A.P. bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap pada Hari Rabu, 15 Mei 2024.



Wawancara dengan Bapak Endang Wahyu Sudarman Putra bertempat di Balai Desa Cilongkrang pada Hari Kamis, 2 Mei 2024.



Wawancara dengan Bapak Rohmanudin, S.Pd. bertempat di Balai Desa Cilongkrang pada Hari Jum'at, 3 Mei 2024.



Wawancara dengan Bapak Sumidi Idelkha bertempat di Balai Desa Cilongkrang pada Hari Kamis, 2 Mei 2024.



Wawancara dengan Ibu Sulis Setiyawati bertempat di Desa Cilongkrang pada Hari Rabu, 15 Mei 2024.



Wawancara dengan Ibu Nasih bertempat di Desa Cilongkrang pada Hari Rabu,
15 Mei 2024.

RIWAYAT PENULIS



Nama : Nadya Eki Nugrahani
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 08 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Cilongkrang rt 03 rw 06, Kecamatan Wanareja,
Kabupaten Cilacap
No.tlp : 082225284731
Email : nadyaekii32@gmail.com

Riwayat pendidikan :

2007-2008 : TK Cempaka 03
2008-2014 : SD Negeri Cilongkrang 03
2014-2017 : SMP Negeri 1 Cipari
2017-2020 : SMA Negeri 1 Cipari
2020-2024 : FISIP Universitas Galuh